

**PROSES PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI ERA PANDEMI  
DI DESA SELOTO KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**PROPOSAL SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**SAPINA ATALIA**

**NPM : 18.01.03.0.034-01**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR**

**TAHUN 2022**

**JUDUL PROPOSAL SKRIPSI :**

**PROSES PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI ERA PANDEMI  
DI DESA SELOTO KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT**

**NAMA MAHASISWA :**

**SAPINA ATALIA**

**NPM : 18.01.03.0.034-01**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal ini telah disetujui

untuk diuji

Tanggal : .....

Oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

MUHAMMAD SALAHUDDIN,S.Ag.,M.Si

MUSLIM,S.Sos.,M.Sos

**JUDUL PROPOSAL SKRIPSI:**

**PROSES PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI ERA PANDEMI  
DI DESA SELOTO KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT**

**NAMA MAHASISWA :**

**SAPINA ATALIA**

**NPM : 18.01.03.0.034-01**

**HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS**

Proposal Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumbawa Besar

DEKAN

**SRI NURHIDAYATI, S.IP.,M.PA**

**NIDN. 0827068101**

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Hiduplah untuk membahagiakan orang lain, jika tidak bisa memberi rasa bahagiaa setidaknya tidak menjadi rasa sedih yang terus muncul, jadilah insan yang selalu memberi dampak positif dalam kehidupan sosial

### **PERSEMBAHAN**

Proposal skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Orang-orang Tercinta:

1. Terima kasih yang sebesar” nya kepada ibu saya yang telah menjalankan peran ganda sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk keluarga saya, saudara saya yag selalu memberi dukungan akan selalu pencapaian mimpi yang harus saya gapai.
3. Terima kasih untuk semua teman-teman saya “Belojas Group” yang telah membantu dan support dalam menyusun proposal skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **PROSES PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI ERA PANDEMI DI DESA SELOTO KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai syarat untuk mendapatkan strata satu Sarjana Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa Sumbawa Besar.

Dalam penyusunan Proposal skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya bagi penyelesaian proposal skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd selaku Rektor Universitas Samawa yang telah memberikan semangat dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
2. Ibu Sri Nurhidayati S.IP.,M.PA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

3. Bapak Heri Kurniawansyah HS, MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa Sumbawa Besar.
4. Bapak Muhammad Salahuddin, S.Ag.,M.Si, selaku pembimbing pertama, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Sos, selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan arahan, sehingga proposal skripsi dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Bapak ibu Dosen dan TU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepada orang-orang terdekatku, serta sahabat-sahabatku terima kasih atas dukungan dan doa yang kalian berikan sehingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Sumbawa Besar, Maret 2022

Sapina Atalia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

DAFTAR ISI ..... vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 5

D. Manfaat Penelitian ..... 5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan ..... 7

B. Tinjauan Tentang Desa ..... 8

C. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa ..... 10

D. Tinjauan Tentang Pembangunan ..... 19

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 21

B. Fokus Penelitian ..... 22

C. Lokasi dan Situs Penelitian ..... 22

D. Jenis dan Sumber Data ..... 23

E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Teknik Analisis Data .....	25
G. Keabsahan Data .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pedesaan merupakan ruang lingkup kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sebuah pedesaan tentunya memiliki keanekaragaman baik dari segi bahasa, budaya dan adat istiadat. Adanya keanekaragaman tersebut berjalan sesuai dengan kehidupan masyarakat dipedesaan. Pemerintahan desa berdasarkan UU.No.6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

## Pengelolaan ADD di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada tahun 2007 Desa Seloto membentuk pemeritahan Desa sendiri karena pemerintahan menganggap bahwa Desa Seloto sudah patut untuk membentuk pemerintahan sediri baik dilihat dari segi jumlah penduduk, sumber daya alam (SDA), Maupun sumber daya manusia (SDM). Desa Seloto merupakan desa yang terletak di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan.

Sebelum pandemi Alokasi dana desa Seloto (ADD) digunakan untuk operasional perkantoran untuk membayar jasa staf badan pengurus desa (BPD) dan pelaksana kegiatan yang ada didesa. Alokasi dana di desa Seloto juga digunakan untuk operasional kegiatan yang ada didesa dan pendapatan asli desa (PAD) bisa digunakan untuk apa saja. Penyaluran Alokasi dana di desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat biasanya digunakan untuk pembangunan.

Tetapi pada tahun 2019 saat pandemic COVID-19 meningkat dana desa diperuntukan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan penanganan COVID-19 serta untuk membantu masyarakat dalam pertanian.

Permasalahan yang terjadi saat ini di Desa Seloto yakni tentang Dana Desa berdasarkan penyaluran Dana misalnya seperti BLT Covid,Dana untuk para Lansia, penyaluran dana untuk janda karna

menurut masyarakat setempat dana yang dikeluarkan oleh pihak desa yakni tidak di salurkan dengan sangat rata, bahkan ada yang berpikir bahwa dana yang disalurkan hanya untuk masyarakat yang dekat dengan kepala desa saja atau yang ada hubungan darahnya dengan staff yang ada di kantor desa tersebut. Jelas sudah diterangkan bahwa nama yang keluar untuk segala bantuan dari pihak desa sudah di saring dan dipilih dengan sangat teliti.

Penyaluran alokasi dana tentunya di atur sendiri oleh aparat desa. Kepala Desa memiliki peran penting dalam pengoptimalan anggaran penyaluran alokasi dana di desa Seloto kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Perlu kita ketahui menjalankan kewajiban sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab yang berat bagi kepala desa. Melihat dari satu tahun kebelakang adanya berita miring tentang beberapa kepala desa yang ada di kabupaten Sumbawa barat dinilai buruk oleh masyarakat tentang penggunaan dana desa, akan tetapi hal sebenarnya kepala desa yang baru menemrma jabatan, gugup ketika dihadapkan dengan dana desa yang sangat banyak nominalnya, sehingga mereka bingung akan mengalokasikan dana kemana saja. Sehingga dana tersebut tidak merata atau dana yang dikeluarkan tidak sesuai anggaran. Berdasarkan latar belakang diatas, judul proposal skripsi ini yaitu : “Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di era pandemi?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Proses Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di era pandemi?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di era pandemic dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di era pandemic dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang studi Ilmu Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, menjadi bahan masukan dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun-tahun yang akan datang;
- b. Untuk pemerintah desa Seloto, berguna sebagai acuan dalam memberikan sumbangan saran kepada pemerintah daerah terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- c. Untuk masyarakat desa Seloto, mendapat gambaran mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan pemanfaatan dan faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatannya khususnya pada Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Sebagai bahan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Pengelolaan**

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Kata “pengelolaan” dapat di artikan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto,1993) penggunaan dapat di artikan sebagai suatu rangkain pekerjaan atau usaha yang di lakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Nanang Fattah (2004). Berpendapat bahwa proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang di tampilkan oleh seorang menejer atau pimpinan yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading) dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh kerena itu, apabila dal sistem dan proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengarahan, penganggaran dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses prencanaan tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabudin Qalyubi,2007)

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dari suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan suatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

## **B. Tinjauan Tentang Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini adalah desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem pemerintahan Nasional dalam wadah Negara.

Menurut Bintarto (1983), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di suatu



daerah,dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sedangkan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa”menyatakan bahwa”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa,landasan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Winardi (1988) dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri .pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat,bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan masyarakat luar.

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa,bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

### **C. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)**

#### **1. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksudnya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 72 Ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Virus Disease

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Adapun isi dari Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan”. Sedangkan ayat (1) huruf b nya adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan bupati yang tertuang pada perbub sumbawa barat pada bab III pasal 17 ayat 3 dan 4. Pada ayat 3 di nyatakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian: 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan bulan kedua sampain dengan bulan kelima.

b. Tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:

1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan. bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan untuk bulan berkenaan untuk bulan. ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap III 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa digunakan untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Kemudian pada ayat 4 Penyaluran Dana Desa untuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan Kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT tahap ke delapan sampai dengan tahap kedua belas paling cepat bulan maret, dan 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling lambat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

## **2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Adapun tujuan dari alokasi dana desa antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.

## **3. Pengertian Anggaran**

Anggaran Menurut Munandar (2001) anggaran adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau satu kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang”.

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch,2000).

Menurut Nafarin (2000).” anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang tetapi juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”. Menurut Sofyan (1996) ”anggaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk mencapai pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membuat pelaksanaan tanggung jawab manajemen”. Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Oleh karena itu anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana (Rusdianto, 2006)

- a. Dinyatakan dalam suatu moneter penulis dalam suatu moneter tersebut dapat juga didukung oleh susunan kuantitatif lain, misalnya unit penyusunan rencana kerja dalam satuan 10 moneter tersebut, bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Rencana kerja dalam diwujudkan didalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca dan mengerti. Oleh karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.
- b. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun dalam kurun waktu lebih pendek, seperti lima tahunan. Batasan waktu dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.

- c. Mengandung komitmen manajemen anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh pihak organisasi untuk apa yang telah ditetapkan. Tampak upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak bermanfaat bagi perusahaan. Karena itu didalam penyusunan anggaran perusahaan mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.
- d. Usaha anggaran harus disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tampak persetujuan dari atasan pihak penyusunan.
- e. Setelah disetujui anggaran hanya bisa diubah jika ada keadaan khusus. Jadi tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan dengan situasi yang ada.
- f. Jika terjadi penyimpangan/varians di dalam pelaksanaan, harus dianalisis sebab terjadinya kepentingan tersebut. Karena, tampak ada analisis yang mendalam tampak penyimpangan tersebut maka potensi untuk berulang lagi dimasa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis



penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang lagi dimasa mendatang dan agar penyusunan anggaran dikemudian hari menjadi relevan dan situasi yang ada.

#### **4. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Menurut Nick Devas (1989), prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perubahan paradigma seiring dengan perencanaan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan pemerintahan:

##### **a. Transparansi**

Adanya keterbukaan pemerintahan (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah, sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan keuangan daerah atau APBD.

##### **b. Efisiensi**

Pengelolaan keuangan daerah harus di dasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin, guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Dengan kata lain, standar pelayanan minimal merupakan target yang harus dicapai suatu proporsi biaya yang ditetapkan.

c. Efektif

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran haruslah tetap pada sasaran. Selama ini pemda sering tidak memperdulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tetap atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendapat anggaran kinerja yang berorientasi hasil atau output.

d. Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut adalah pertanggungjawaban kepada publik yang dapat dilakukan secara institusional kepada DPRD. DPRD akan menilai apakah kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolak ukur sesuai dengan apa yang direncanakan semula.

e. Partisipasi

Peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengelola keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah (APBD) juga harus mengakomodasikan aspirasi publik dalam mengikutsertakan masyarakat secara langsung.

## **D. Tinjauan Tentang Pembangunan**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakan proses pembangunan tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evaluasi sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang sering kali ditemui berbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, antaranya:

- a. Terbatasnya persediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional.
- b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dari luar (eksternal).

## 2. Tujuan Pembangunan Desa

Adapun secara lebih terperinci, tujuan pembangunan desa menurut Sudiharto diwandono meliputi:

- a. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan;
- b. Tujuan sosial kearah pemerataan kesejahteraan penduduk desa;
- c. Tujuan kultural, dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan;
- d. Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjukan usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini hanya untuk memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian Deskriptif ini akan memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan fenomenal yang diamati, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Ciri-ciri metode penelitian ini adalah data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

Nawawi (1993:63) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode penelitian deskriptif kualitatif berarti suatu penelitian yang menggambarkan dan atau melukiskan suatu peristiwa untuk menghasilkan kesimpulan secara umum, oleh karena itu penelitian ini hanya berusaha untuk

mempokuskan pada penggambaran masalah dan pemecahan yang dianalisis secara kualitatif.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian diarahkan pada:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Era Pandemi
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Era Pandemi

## **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

2. Situs Penelitian

Situs adalah sebagian wilayah yang diselidiki. Situs penelitian dilakukan di kantor desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Adapun jenis data yang akan ditampilkan pada penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan nara sumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya.

#### **b. Data Skunder**

Data Skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, perundang-undangan serta ketentuan perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **2. Sumber-sumber data**

Sedangkan sumber-sumber data , yaitu:

#### **a. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi informan penelitian antara lain sebagai berikut:

- 1). Kepala Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2). Sekretaris desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3). Bendahara desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

4). BPD desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Dokumen

Dokumen,yaitu berupa data-data keuangan tahun 2019 tentang Rancangan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDES).

c. Peristiwa

Peristiwa yaitu kejadian atau pakta yang terjadi atau berlangsung di dalam masyarakat dan menjadi sumber data.

### **E. Teknik Pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data adalah inteview,dokumen,observasi.

1. Interview (Wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.Bentuk wawancara yang diperlukan adalah wawancara bebas dan terpimpin artinya tidak terikat dengan daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu,melainkan setiap yang ada kaitannya dengan permasalahan.Wawancara dan komunikasi tersebut merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan.Didalam proses wawancara selalu terdapat dua pihak yang menempati dua kedudukan yang berbeda,pihak yang satu berfungsi sebagai pemberi informasi dan pihak lain sebagai sebagai pengumpul informasi.Yang menjadi informan dalam pelaksanaan wawancara ini adalah Kepala Desa Seloto,Ketua RT,Ketua BPD dan Masyarakat yang mengelolah Dana Desa di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.



## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah dan arsip.

## 3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis dari objek penelitian sehingga dapat diperoleh dari data-data yang diperlukan.

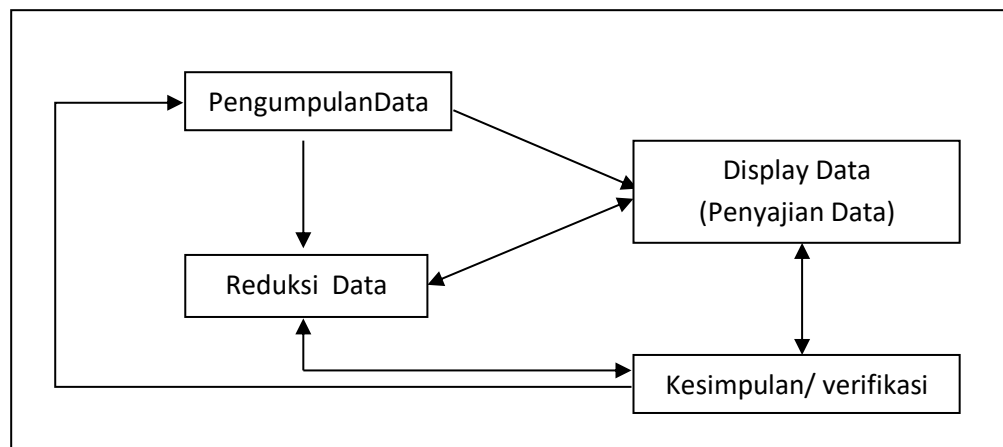
## **F. Teknik Analisi Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Analisi data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan menganalisis data akan memberikan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian, sebagaimana pendapat Nasir (1984:405).

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Gambar 3.1  
Skema analisis Data



*Sumber: Prof.Dr.Sugiono,2005.*

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification)

Pada analisis data, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep dasar analisa data. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang di

sarankan oleh data. Analisa data dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak data diperoleh di lapangan. Usahakan jangan sampai data tersebut sudah terkenal macam-macam pengaruh, antara lain pikiran penelitian sehingga menjadi terpolusi. Apabila terlalu lama dianalisa maka data data menjadi kadaluwarsa.

Dari analisa data dapat diperoleh temah dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

#### 1. Pengumpulan Data

Merupakan tahap yang harus dilewati oleh seorang peneliti. Adapun urutannya terletak pada tahap setelah tahap pengumpulan data. Dalam arti sempit, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan pengolahan data, yang terdiri atas tabulasi dan rekapilatas data. Tabulasi data dinyatakan sebagai proses penyaduan atau penyatupaduan sejumlah data dan informasi yang diperoleh peneliti dari setiap sasaran peneliti menjadi satu kesatuan daftar, sehingga data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dianalisis. Rekapilatas merupakan langkah penjumlahan dari setiap kelompok sasaran penelutih yang memiliki kerakter yang sama, berdasar kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam proses pelaksanaaannya, tahap pengelolaan data tudak cukup hanya terdiri atas tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi mencakup tahap. Di antaranya adalah tahap reduksi data, penyajian data interprentasi data dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Lebih dari sekedar itu, pengolahan data, yang tidak lain merupakan tahap analisis dan interpretasi data mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 2. Reduksi data

Diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data baik pengurangan terhadap data dan kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

## 3. Interpretasi Data

Merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tidak tersurat, namun lebih dari pada memahami atau menafsirkan mengenai ilmu yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

## 4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Merupakan proses dari perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensi terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Tahap analisis dan interpretasi data adalah tahap yang pasti dilalui oleh para

peneliti tersebut peneliti kualitatif. Dalam uraian pokok diatas di kemukakan bahwa tahap dan proses analisis dan interpretasi data, setiktidaknya terdiri atas tiga komponen penting yang terdiri meliputi:

1. Reduksi,
2. Penyajian, dan
3. Kesimpulan/verifikasi.

### **G. Keabsahan Data**

Burhan Bungin (2000:3) menyatakan bahwa “untuk mengukur apakah penelitian kualitatif sudah memenuhi standar penelitian ilmiah maka dapat dilihat pada validitas (kesahiban) atau keabsahan data dan reibiilitas (keterandalan) penelitian. Menurut Moleong.” untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Ada 4 (empat) teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu dapat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability)”.

#### **a. Derajat Kepercayaan (credibility)**

Peneliti telah melakukan penelitian dengan melakukan observasi dan dokumentasi secara langsung di lapangan dan peneliti dapat mempertanggungjawabkannya.

b. Keteralihan (trasferability)

Terhadap data ini peneliti telah mengemukakan jelas peneliti deskriptif namun peneliti tidak membuat keputusan pengalihan.

c. Kebergantungan (dependability)

Peneliti menjelaskan bahwa peneliti memerlukan orang lain informasi untuk kelengkapan data agar keabsahan dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

d. Kepastian (confirmability)

Secara keseluruhan bahwa data yang ada merupakan data yang objektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan keabsahannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1993) *Manajemen* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Binantaro, R. Dr 1983. *Instraksi Desa dan Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Daves Nick, Brian, Anne Both, Kenneth Dovey, Roy Kelly, 1989, *Keuangan dan Pemerintahan Daerah di Indonesia* (penerjemah, Masri Maris) penerbit UI Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Islam, Irfan. 1984 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William, 1984. *Analisa Publik*, Yogyakarta: PT. Haninidita Offset
- May Rudy, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: PT. Rafika Anditama
- Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis Data*. Jakarta: Intermedia
- Wahyudi, Akdom, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, Bandung Alfabeta
- Mar'at. 198. *Perubahan dan Pengukuran*, Bandung: Ghalia Indonesia
- Muhsin dan Fadillah putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Politik*, Malang Averroes Press
- Moleong, L.J. 1996. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya
- Maksin, Sumitro, 1994, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta : Media Widya Mandala
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metode Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.



Roharja,M,D,1992. *Keswadayaan Dalam Pembangunan Ekonomi*,Jakarta :

LP3ES

Surjadi,1995,*Pembangunan Masyarakat Desa*,Bandung : Mandar Maju

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021